

2017

STATISTIK
KEUANGAN DAERAH
PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2017

STATISTIK

KEUANGAN DAERAH

PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2017

ISBN : 978-602-5671-38-8

Nomor Publikasi : 62540.1808

Katalog BPS : 7203007.62

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman : xvi + 68

Naskah:

Bidang Statistik Distribusi

Penyunting

Bidang Statistik Distribusi

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Gambar Kulit

Bidang Statistik Distribusi

Tata Letak:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Dicetak oleh:

CV. Azka Putra Pratama

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan
komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum	:	Yomin Tofri
Penanggung Jawab Teknis	:	Bambang Supriono
Penyusun	:	Eka Restuti Fajarina Eko Susanto
Infografis	:	Rini Nurul Hidayah
Tata Letak	:	Alfina Fasriani
Gambar Kulit	:	Eko Susanto
Editor	:	Bambang Supriono

https://kalteng.bps.go.id

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2017 merupakan publikasi tahunan, yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. Secara garis besar, publikasi ini berisi data statistik keuangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sumber data statistik keuangan daerah ini berasal dari data sekunder yang diperoleh berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja secara agregat selama periode tahun 2017.

Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Palangka Raya, Desember 2018

BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Kepala,



Yomin Tofri, M.A.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik.....	xi
Daftar Lampiran.....	xiii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	4
1.4 Konsep dan Definisi.....	5
BAB II Ulasan Ringkas	19
2.1 Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.....	21
2.2 Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29
Lampiran	35

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	23
Tabel 2.2	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi (Ribu Rupiah), 2016- 2017.....	27
Tabel 2.3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah), 2016-2017	29
Tabel 2.4	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah), 2016-2017	32

https://kalteng.bps.go.id

Daftar Grafik

Grafik 2.1	Realisasi	Pendapatan	Daerah	Provinsi,	2013-2017	
	(Triliun).....				21	
Grafik 2.2	Komposisi	Realisasi	Pendapatan	Daerah	Provinsi,	
	2017.....				22	
Grafik 2.3	Komposisi	Sumber	Pendapatan	Asli	Daerah (PAD)	Provinsi,
	2017.....					24
Grafik 2.4	Komposisi	Sumber	Dana	Perimbangan	Provinsi,	
	2017.....					25
Grafik 2.5	Realisasi	Belanja	Daerah	Provinsi,	2013-2017	
	(Triliun).....				26	
Grafik 2.6	Komposisi	Realisasi	Belanja	Langsung	Daerah	Provinsi,
	2017.....					28
Grafik 2.7	Komposisi	Realisasi	Pendapatan	Daerah	Kabupaten/Kota,	
	2017.....					30
Grafik 2.8	Realisasi	Pendapatan	Daerah	Kabupaten/Kota,	2013-2017	
	(Triliun).....					31
Grafik 2.9	Pendapatan	Asli	Daerah (PAD)	Menurut	Kabupaten/Kota,	
	(Miliar).....					32
Grafik 3.0	Realisasi	Belanja	Daerah	Menurut	Kabupaten/Kota,	
	(Miliar).....					34

Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2016-2017	37
Lampiran 2.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	38
Lampiran 3.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2016-2017	39
Lampiran 4.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2016-2017	40
Lampiran 5.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Rupiah), 2016-2017	41
Lampiran 6.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	42
Lampiran 7.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ribu Rupiah), 2016-2017	43
Lampiran 8.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ribu Rupiah), 2016-2017	44
Lampiran 9.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	45
Lampiran 10.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	46
Lampiran 11.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Ribu Rupiah), 2016-2017	47
Lampiran 12.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	48
Lampiran 13.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	49
Lampiran 14.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	50

Lampiran 15.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	51
Lampiran 16.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Ribu Rupiah), 2016-2017	52
Lampiran 17.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	53
Lampiran 18.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Ribu Rupiah), 2016-2017	54
Lampiran 19.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	55
Lampiran 20.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan (Ribu Rupiah), 2016-2017	56
Lampiran 21.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	57
Lampiran 22.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Ribu Rupiah), 2016-2017	58
Lampiran 23.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	59
Lampiran 24.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	60
Lampiran 25.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Ribu Rupiah), 2016-2017	61
Lampiran 26.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	62
Lampiran 27.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	63
Lampiran 28.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	64
Lampiran 29.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	65

Lampiran 30.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	66
Lampiran 31.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	67
Lampiran 32.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Ribu Rupiah), 2016-2017.....	68

https://kalteng.bps.go.id

1

PENDAHULUAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 2017

PENDAPATAN
DAERAH

15,57% ↑

BELANJA
DAERAH

16,13% ↑

Triliun Rupiah **4,10** 2017

Triliun Rupiah **3,55** 2016

2017 **3,17** Triliun Rupiah

2016 **3,69** Triliun Rupiah



SUMBER
UTAMA

DAU **38,39%**

1,57 Triliun Rupiah

PAJAK DAERAH **26,62%**

1,09 Triliun Rupiah

BELANJA
UTAMA

PEGAWAI TIDAK LANGSUNG

1,12 Triliun Rupiah **30,25%**



BARANG DAN JASA

0,78 Triliun Rupiah **21,03%**

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen penting, yang memiliki kontribusi secara esensial dalam hal pembiayaan, terhadap seluruh kebijakan strategis pembangunan pemerintah daerah. Postur APBD menentukan potret kapabilitas sumber daya dalam merealisasikan program kerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Guna mewujudkan pembangunan dan layanan masyarakat yang berkualitas, efisiensi dalam menggunakan anggaran, efektivitas program kerja, dan akuntabilitas kinerja pengelolaan anggaran menjadi dimensi perhatian publik. Oleh karenanya, transparansi birokrasi tidak hanya menyasar pada tataran teknis, namun juga tatalaksana administrasi organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (tentang Otonomi Daerah) dan No. 25 Tahun 1999 (tentang Perimbangan Keuangan), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (tentang Pemerintah Daerah) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan arah pembangunan secara lebih mandiri. Landasan hukum ini diharapkan dapat menjamin kualitas pembangunan yang lebih representatif bagi kebutuhan masyarakat. Sehingga, pemerintah daerah perlu didorong agar mampu mewujudkan otonomi daerah secara

akuntabel. Realisasi penerimaan sebagai pendapatan dan pengeluaran belanja daerah, harus mampu merefleksikan tingginya tingkat tanggung jawab birokrasi terhadap tujuan pembangunan masyarakat secara berkesinambungan.

1.2 Tujuan

Secara garis besar, publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2017 ini memberikan informasi mengenai :

- a. Realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Potensi sumber dana daerah dan peranannya terhadap pembangunan daerah selama tahun anggaran.
- c. Sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan daerah selama tahun anggaran.

1.3 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Kompilasi data anggaran serta realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh dari hasil pencacahan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Daftar APBD-1 dan Daftar K-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kompilasi data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota diperoleh dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dan hasil pencacahannya dicatat dengan menggunakan Daftar APBD-2 dan Daftar K-2.

1.4 Konsep dan Definisi

Bagian ini berisi konsep dan definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan dalam Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2017. Konsep tersebut mengacu pada istilah yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pemerintah daerah, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran.

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah realisasi atau perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

A.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

A.1.1.Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, galian golongan C, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah serta bangunan, dan lain-lain.

A.1.2.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pengujian kendaran bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain-lain.

A.1.3.Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non

bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

A.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang **meliputi** hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

A.2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

A.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, *landrent*, iuran eksplorasi/eksplorasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan

dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

A.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

A.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
2. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
3. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

A.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah, dana darurat yang merupakan dana dari

APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan atau krisis solvabilitas, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan yang sah lainnya.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

B.1. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

B.1.1. Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam belanja pegawai.

B.1.2. Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

B.1.3. Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk **bantuan** biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

B.1.4. Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

B.1.5. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang dan atau

barang kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B.1.5.1.Belanja Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

B.1.5.2.Belanja Partai Politik adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

B.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepala desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil terdiri atas:

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
2. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
4. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota

5. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

B.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

1. Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

B.1.8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya **tidak** biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

B.2. Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan **dapat** diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

B.2.1. Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

B.2.2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk **pembelian**/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, dan lainnya.

B.2.3. Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

C. **Pembiayaan Daerah** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaiknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan. Pembiayaan daerah terdiri atas

penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

C.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

C.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu adalah selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.

C.1.2. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

C.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

C.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan

obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

C.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya.

C.1.6. Penerimaan Piutang Daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

C.1.7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir adalah semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

C.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

C.2.1. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya diberikan dalam satu tahun anggaran.

C.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah **pengeluaran** daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

C.2.3. Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

C.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau pihak ketiga.

C.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi dengan dengan pengeluaran pembiayaan.

2

ULASAN SINGKAT

KOMPOSISI REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA 2017

PENDAPATAN DAERAH KAB/KOTA

PAD

9,20%

1,42

Triliun Rupiah

Dana Perimbangan

77,12%

11,95

Triliun Rupiah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

13,68%

2,12

Triliun Rupiah

BELANJA DAERAH KAB/KOTA

Belanja Langsung

50,23%

7,8 Triliun Rupiah

49,77%

7,74 Triliun Rupiah



TAHUKAH ANDA ?

KABUPATEN LAMANDAU



PAD

Paling Mandiri
18,80%

KABUPATEN SUKAMARA



37,67%

Share Belanja Modal Tertinggi

Prioritas Pembangunan Infrastruktur

BAB II

Ulasan Ringkas

2.1 Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan pola meningkat selama lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, rata-rata total pendapatan daerah sekitar Rp 3,69 triliun per tahun.



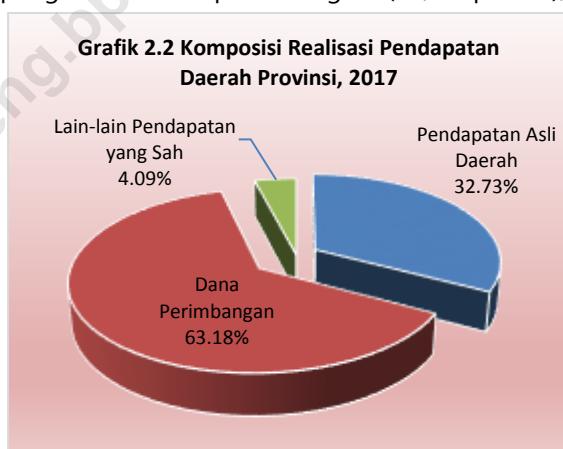
Selama tahun 2017, total pendapatan daerah tercatat Rp 4,41 triliun. Total pendapatan sebesar ini sekitar 92,94 persen merupakan pendapatan di luar penerimaan pembiayaan daerah. Dibandingkan tahun lalu, total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan 22,99 persen, kendatipun masih ditopang oleh tingginya porsi dana perimbangan.

Pada periode yang sama, rata-rata total belanja daerah selama tahun terakhir juga cukup tinggi yakni sekitar Rp3,50 triliun per tahun. Selama tahun 2017, keseluruhan realisasi belanja daerah tercatat Rp3,84 triliun. Dari capaian ini berarti hanya terdapat selisih Rp0,57 triliun pada APBD selama tahun 2017. Tingkat ketergantungan terhadap alokasi

anggaran yang masih tinggi dari pemerintah pusat, membuka ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk merancang sebuah strategi baru. Hal ini penting untuk mengurangi tingkat ketergantungan selama ini. Implementasi program pembangunan harus semakin efisien dan ketepatan dalam penentuan skala prioritas, sehingga terjadi percepatan dalam mengembangkan potensi daerah berbasis daya tarik investasi. Semakin tingginya iklim investasi baru akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, potensi ekonomi baru akan menciptakan sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah.

2.1.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi

Selama tahun 2017, pendapatan pemerintah daerah secara keseluruhan masih ditopang oleh dana perimbangan (63,18 persen), terutama Dana Alokasi Umum—DAU (38,39 persen) dan Dana Alokasi Khusus—DAK (15,71 persen). Sedangkan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif masih rendah (32,73 persen).



persen). Porsi terbesar pada PAD, masih berasal dari pajak daerah (81,33 persen) dan pendapatan PAD lainnya (18,67 persen).

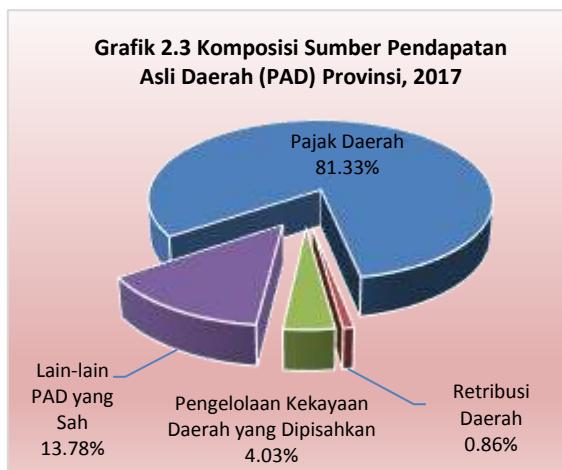
**Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi (Ribu Rupiah),
2016-2017**

Jenis Pendapatan	2016	2017	Perubah n (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENDAPATAN DAERAH	3 548 504 774	4 100 957 755	15,57
1. Pendapatan Asli Daerah	1 158 303 929	1 342 330 619	15,89
1.1. Pajak Daerah	941 491 438	1 091 749 859	15,96
1.2. Retribusi Daerah	10 680 538	11 521 594	7,87
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dimiliki 1.4. Lain-lain PAD yang Sah	44 908 112 161 223 841	54 057 991 185 001 175	20,37 14,75
2. Dana Perimbangan	1 878 977 521	2 590 877 895	37,89
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	342 879 620	372 437 952	8,62
2.2. Dana Alokasi Umum	1 294 850 243	1 574 382 856	21,59
2.3. Dana Alokasi Khusus	241 247 658	644 057 087	166,97
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	511 223 329	167 749 241	-67,19
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	39 349 626	311 638 652	691,97
Jumlah	3 587 854 405	4 412 596 407	22,99

Masih rendahnya kontribusi pendapatan dari retribusi daerah (0,86 persen) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (4,03 persen), membuka peluang bagi kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong berbagai potensi ekonomi regional. Upaya percepatan dalam pengembangan kekuatan industri baik berbasis rumah tangga maupun masuknya investasi dari wilayah lain. Tingginya potensi sektor perdagangan dan industri pengolahan, perlu difasilitasi melalui instrumen kebijakan

pengembangan ekonomi yang berdaya saing. Termasuk transaksi perdagangan luar negeri yang masih mengandalkan komoditas sumber daya alam. Keberhasilan dalam penguatan ekonomi pada komunitas pelaku usaha, menciptakan nilai tambah yang makin tinggi dan sumber retribusi daerah di masa mendatang.

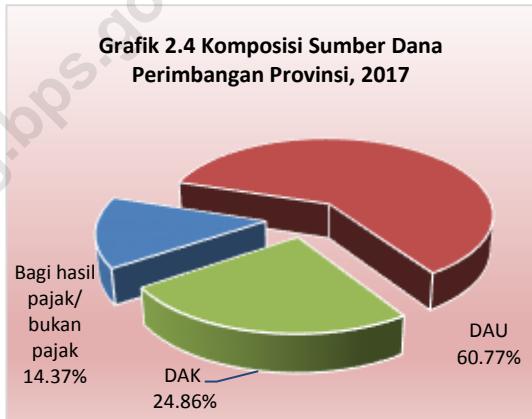
Dilihat dari perkembangannya, realisasi dari penerimaan pendapatan daerah meningkat 15,57 persen dari Rp3,55 triliun (2016) menjadi Rp4,10 triliun (2017). Kenaikan yang cukup tinggi berasal dari dana perimbangan yakni sebesar 37,89 persen dari Rp1,88 triliun (2016) menjadi Rp2,59 triliun (2017). Meskipun nilai pendapatan masih relatif kecil, PAD juga meningkat 15,89 persen dari Rp1,16 triliun (2016) menjadi Rp1,34 triliun (2017). Pendapatan dari pajak daerah meningkat 15,96 persen dari Rp0,94 triliun menjadi Rp1,09 triliun (2017). Sedangkan kenaikan pendapatan dari retribusi daerah masih relatif rendah yakni sebesar 7,87 persen, yang nilainya hanya sekitar Rp0,01 triliun. Lonjakan kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada penerimaan pendapatan dari DAK mencapai 166,97 persen dari Rp0,24 triliun (2016) menjadi Rp0,64 triliun (2017). Komponen DAK sebagian besar



berupa alokasi anggaran untuk non fisik seperti halnya Bantuan Operasional Sekolah—BOS (73,02 persen). Upaya ini menunjukkan tingkat perhatian pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di wilayah Kalimantan Tengah. Sementara itu, pendapatan dari bagi hasil juga meningkat tipis (8,62 persen) sebagai dampak dari merosotnya tingkat capaian perolehan dari pajak bumi dan bangunan selama tahun 2017 (58,64 persen).

Dilihat dari komposisinya, PAD senilai Rp1,34 triliun masih didominasi dari perolehan pajak daerah (81,33 persen) dan pendapatan lainnya kecuali retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah (13,78 persen).

Sumber
pendapatan daerah dari
dana perimbangan
senilai Rp2,59 triliun,
masih dipengaruhi oleh
cukup tingginya DAU
(60,77 persen) dan DAK
(24,86 persen).
Sedangkan dana bagi



hasil yang masih cukup (14,37 persen), merupakan potensi yang dapat dikembangkan melalui beberapa sektor produktif.

2.1.2 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran. Struktur belanja pemerintah daerah provinsi telah mengalami perubahan dari belanja publik dan aparatur menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaannya terletak sistem anggaran belanja yang bersesuaian dengan pelaksanaan program kegiatan.

Selama lima tahun terakhir, realisasi belanja tidak langsung cenderung meningkat secara konsisten setiap tahun. Kenaikan yang cukup tinggi mencapai 23,43 persen yakni dari Rp1,76 triliun rupiah (2016) menjadi Rp2,17 triliun (2017). Kenaikan ini dipengaruhi oleh bertambahnya

alokasi belanja pegawai hingga 121,85 persen dari Rp0,50 triliun (2016) menjadi Rp1,12 triliun (2017). Sementara itu, belanja



langsung mengalami penurunan cukup tinggi yakni 22,58 persen dari Rp1,83 triliun (2015) menjadi Rp1,42 triliun (2016) dan meningkat kembali sebesar 7,11 persen menjadi Rp1,52 triliun (2017). Secara keseluruhan, jumlah belanja meningkat 16,13 persen dari sekitar Rp3,17 triliun (2016) menjadi Rp3,69 triliun (2017). Disisi lain, pengeluaran untuk pembiayaan

daerah juga meningkat 52,68 persen dari Rp0,10 triliun (2016) menjadi Rp0,15 triliun (2017). Rata-rata pengeluaran untuk pembiayaan daerah selama lima tahun terakhir sekitar Rp0,20 triliun per tahun.

Tabel 2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1 755 341 628	2 166 595 949	23,43
1. Belanja Pegawai	502 777 469	1 115 423 441	121,85
2. Belanja Bunga	102 500	0	-100,00
3. Belanja Subsidi	1 163 230	1 161 024	-0,19
4. Belanja Hibah	704 035 183	445 279 733	-36,75
5. Belanja Bantuan Sosial	33 651 796	38 344 000	13,94
6. Belanja Bagi Hasil	510 062 773	556 674 084	9,14
7. Belanja Bantuan Keuangan	3 548 677	6 723 703	89,47
8. Belanja Tidak Terduga	0	2 989 964	
B. BELANJA LANGSUNG	1 419 364 134	1 520 293 267	7,11
1. Belanja Pegawai	164 699 321	179 626 364	9,06
2. Belanja Barang dan Jasa	470 800 020	775 421 639	64,70
3. Belanja Modal	783 864 793	565 245 264	-27,89
TOTAL BELANJA	3 174 705 762	3 686 889 216	16,13
C. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	101 509 990	154 990 000	52,68
Jumlah	3 276 215 752	3 841 879 216	17,27

Berdasarkan distribusinya, porsi terbesar belanja daerah selama tahun 2017 berasal dari komponen belanja tidak langsung (56,40 persen), diikuti oleh belanja langsung (39,57 persen) dan pengeluaran pembiayaan daerah (4,03 persen). Pada komponen belanja tidak langsung, didominasi

oleh belanja pegawai (51,48 persen), diikuti oleh belanja bagi hasil (25,69 persen) dan belanja hibah (20,55 persen). Beberapa komponen yang porsinya masih relatif rendah adalah belanja untuk subsidi (0,06 persen), bantuan keuangan (0,31 persen), dan bantuan sosial (1,77 persen).

Terjadi kenaikan porsi realisasi belanja pegawai dari 28,64 persen (2016) menjadi 51,48 persen (2017) pada komponen belanja tidak langsung. Sementara itu, terjadi penurunan pada realisasi belanja hibah dari 40,11 persen (2016) menjadi 20,55 persen (2017) dan belanja bagi hasil dari 29,06 persen (2016) menjadi 25,69 persen (2017). Namun demikian, porsi realisasi belanja pegawai sebagai belanja langsung relatif stabil yakni dari 11,60 persen (2016) menjadi 11,82 persen (2017). Pergeseran porsi realisasi belanja langsung, terjadi antara



komponen belanja barang dan jasa terhadap belanja modal. Realisasi belanja barang dan jasa meningkat dari 33,17 persen (2016) menjadi 51,00 persen (2017). Sebaliknya, terjadi penurunan realisasi pada belanja modal dari 55,23 persen (2016) menjadi 37,18 persen (2017). Pergeseran proporsi realisasi pembiayaan dalam struktur APBD ini, diharapkan mampu meningkatkan sinergisitas antar program kerja pemerintah daerah dan kualitas layanan kepada masyarakat.

2.2 Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.2.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Ribuan Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	15 885 111 874	15 489 989 114	-2,49
1. Pendapatan Asli Daerah	970 533 448	1 399 372 210	44,19
1.1. Pajak Daerah	267 592 214	543 286 094	103,03
1.2. Retribusi Daerah	110 946 845	89 320 760	-19,49
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70 326 504	91 912 685	30,69
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	521 667 885	674 852 671	29,36
2. Dana Perimbangan	12 749 929 215	11 887 081 689	-6,77
2.1. Bagi Hasil Pajak	1 458 244 680	1 114 585 360	-23,57
2.3. Dana Alokasi Umum	8 714 258 772	8 590 433 740	-1,42
2.4. Dana Alokasi Khusus	2 577 425 763	2 182 062 589	-15,34
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	2 164 649 211	2 203 535 215	1,80
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1 936 961 068	1 891 542 295	-2,34
Jumlah	17 822 072 942	17 381 531 409	-2,47

Secara keseluruhan, realisasi total pendapatan pemerintah kabupaten/kota selama tahun 2017 menurun 2,47 persen dari Rp17,82 triliun (2016) menjadi Rp17,38 triliun (2017). Penurunan terjadi pada realisasi pendapatan daerah sebesar 2,49 persen dari Rp15,89 triliun (2016) menjadi Rp15,49 triliun (2017) dan realisasi pendapatan pemberian daerah sebesar 2,34 persen dari Rp1,94 triliun (2016) menjadi

Rp1,89 triliun (2017). Disinggah pendapatan daerah, terjadi lonjakan kenaikan PAD sebesar 44,19 persen dari Rp0,97 triliun (2016) menjadi Rp1,40 triliun (2017). Kontribusi kenaikan berasal dari penerimaan pajak daerah (103,03 persen), pengelolaan kekayaan daerah (30,69 persen), dan pendapatan PAD sah lainnya (29,36 persen). Besarnya pendapatan daerah juga ditopang oleh kenaikan pendapatan lain diluar PAD dan dana perimbangan sebesar 1,80 persen dari Rp2,16 triliun (2016) menjadi Rp2,20 triliun (2017). Selama setahun terakhir, pendapatan daerah dari dana perimbangan menurun 6,77 persen dari Rp12,75 triliun menjadi Rp11,89 triliun (2017). Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan dari bagi hasil pajak (23,57 persen), DAU (1,42 persen), dan DAK (15,34 persen).

Dilihat dari proporsi komponen utama pendapatan dalam struktur APBD, relatif stabil selama setahun terakhir. Hal ini terlihat dari komponen pendapatan daerah sebesar 89,13 persen (2016) dan 89,12 persen (2017). Demikian halnya pada penerimaan dari pembiayaan daerah sebesar 10,87 persen (2016) dan 10,88 persen (2017). Namun demikian, terlihat sedikit terjadi pergeseran pada proporsi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 6,11 persen (2016)



menjadi 9,03 persen (2017) dan dana perimbangan sebesar 80,26 persen (2016) menjadi 76,74 persen (2017). Kenaikan proporsi pendapatan pada komponen PAD, dipengaruhi oleh kenaikan porsi pendapatan pajak daerah dari 27,57 persen (2016) menjadi 38,82 persen (2017). Sedangkan kenaikan proporsi

Grafik 2.8 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, 2013-2017 (Triliun)

Tahun	Pendapatan daerah	Dana PAD	Dana perimbangan	Pendapatan lainnya
2013	11.5	0.5	9.5	0.5
2014	13.0	0.5	10.5	0.5
2015	14.5	0.5	11.5	1.0
2016	16.0	0.5	13.0	1.0
2017	15.5	0.5	12.5	0.5

pada komponen daerah perimbangan, terjadi pada DAU dari 68,35 persen (2016) menjadi 72,27 persen (2017). Meskipun secara umum terjadi penurunan APBD (2,47 persen) dibandingkan tahun lalu, namun terjadi kenaikan cukup signifikan pada potensi pajak daerah (103,03 persen) dan PAD lainnya (29,36 persen), sehingga mampu mengungkit kenaikan seluruh PAD tahun 2017 (44,19 persen). Meskipun kontribusinya terhadap APBD masih rendah, namun PAD menunjukkan pola kenaikan secara konsisten setiap tahun.

Selama tahun 2017, terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki PAD di atas Rp100,00 miliar meliputi Kotawaringin Timur (Rp245,98 miliar), Kotawaringin Barat (Rp176,86 miliar), Lamandau (Rp162,48 miliar), Palangka Raya (Rp150,93 miliar), Seruyan (Rp110,71 miliar), dan Barito Timur (Rp100,37 miliar). Sementara itu, terdapat lima

kabupaten yang memperoleh dana perimbangan di atas Rp900,00 miliar meliputi Kapuas (Rp1,34 triliun), Kotawaringin Timur (Rp1,10 triliun), Murung Raya (Rp959,26 miliar), Kotawaringin Barat (Rp938,38 miliar), dan Katingan (Rp920,15 miliar). Dengan demikian, tingginya PAD



Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur selama tahun 2017, masih ditopang oleh dana perimbangan yang juga cukup tinggi dalam struktur APBD.

2.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sebagaimana halnya pada pendapatan daerah, jumlah total belanja daerah secara keseluruhan juga mengalami penurunan 2,13 persen dari Rp16,04 triliun (2016) menjadi Rp15,69 triliun (2017). Belanja daerah di luar pengeluaran untuk pembiayaan daerah juga menurun 1,97 persen dari Rp15,87 triliun menjadi Rp15,55 triliun (2017). Pada komponen belanja tidak langsung, sebagian besar meningkat kecuali belanja pegawai dan belanja hibah. Penurunan pada belanja pegawai sebesar 4,64 persen dari Rp5,29 triliun (2016) menjadi Rp5,04 triliun (2017). Sedangkan pada belanja hibah sebesar 18,72 persen dari Rp0,67 triliun (2016) menjadi Rp0,54 triliun (2017). Sementara itu, penurunan juga

terjadi pada belanja langsung sebesar 4,51 persen dari Rp8,17 triliun (2016) menjadi Rp7,81 triliun (2017). Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal. Namun demikian, belanja pegawai meningkat 28,22 persen dari Rp0,58 triliun (2016) menjadi Rp0,75 triliun (2017).

Tabel 2.4 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	7 692 774 386	7 748 844 614	0,73
1. Belanja Pegawai	5 285 440 116	5 040 026 691	-4,64
2. Belanja Bunga	5 644 911	20 374 634	260,94
3. Belanja Subsidi	9 695 087	22 008 096	127,00
4. Belanja Hibah	666 020 195	541 334 105	-18,72
5. Belanja Bantuan Sosial	26 704 394	41 784 305	56,47
6. Belanja Bagi Hasil	20 067 115	45 165 907	125,07
7. Belanja Bantuan Keuangan	1 676 740 509	2 030 299 273	21,09
8. Belanja Tidak Terduga	2 462 059	7 851 603	218,90
B. BELANJA LANGSUNG	8 173 940 196	7 805 030 600	-4,51
1. Belanja Pegawai	583 941 609	748 708 109	28,22
2. Belanja Barang dan Jasa	3 101 913 245	3 033 136 766	-2,22
3. Belanja Modal	4 488 085 342	4 023 185 725	-10,36
TOTAL BELANJA	15 866 714 582	15 553 875 214	-1,97
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	169 246 103	140 761 708	-16,83
Jumlah	16 035 960 685	15 694 636 922	-2,13

Dilihat dari proporsinya, realisasi pengeluaran untuk belanja tidak langsung pemerintah daerah kabupaten/kota masih didominasi oleh belanja pegawai, yakni 68,71 persen (2016) dan 65,04 persen (2017). Porsi yang juga cukup tinggi adalah pengeluaran untuk belanja bantuan keuangan sebesar 21,80 persen (2016) dan 26,20 persen (2017). Sedangkan pada komponen belanja langsung, porsi untuk belanja pegawai relatif rendah yakni 7,14 persen (2016) dan 9,59 persen (2017). Porsi yang lebih besar terdapat pada belanja barang dan jasa dan belanja modal. Selama tahun 2017, belanja barang dan jasa senilai Rp3,03 triliun (38,86 persen) dan belanja modal senilai Rp4,02 triliun (51,55 persen)

Dari empat belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, belanja daerah tertinggi selama tahun 2017 berasal dari Kabupaten

Kapuas sebesar 1,77 triliun rupiah, diikuti Kotawaringin Timur (1,51 triliun), Kotawaringin Barat (1,29



triliun), Katingan (1,18 triliun), Barito Utara (1,15 triliun) dan seterusnya. Adapun alokasi belanja daerah terendah terjadi di Kabupaten Sukamara sebesar 672 miliar rupiah.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	3 548 504 779	4 100 957 755
1. Pendapatan Asli Daerah	1 158 303 929	1 342 330 619
1.1. Pajak Daerah	941 491 438	1 091 749 859
1.2. Retribusi Daerah	10 680 538	11 521 594
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44 908 112	54 057 991
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	161 223 841	185 001 175
2. Dana Perimbangan	1 878 977 521	2 590 877 895
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	342 879 620	372 437 952
2.2. Dana Alokasi Umum	1 294 850 243	1 574 382 856
2.3. Dana Alokasi Khusus	241 247 658	644 057 087
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	511 223 329	167 749 241
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	39 349 626	311 638 652
Jumlah	3 587 854 405	4 412 596 407

Lampiran 2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017	
	(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 755 341 628	2 166 595 949
1. Belanja Pegawai	502 777 469	1 115 423 441	
2. Belanja Bunga	102 500	0	
3. Belanja Subsidi	1 163 230	1 161 024	
4. Belanja Hibah	704 035 183	445 279 733	
5. Belanja Bantuan Sosial	33 651 796	38 344 000	
6. Belanja Bagi Hasil	510 062 773	556 674 084	
7. Belanja Bantuan Keuangan	3 548 677	6 723 703	
8. Belanja Tidak Terduga	0	2 989 964	
B. BELANJA LANGSUNG		1 419 364 134	1 520 293 267
1. Belanja Pegawai	164 699 321	179 626 364	
2. Belanja Barang dan Jasa	470 800 020	775 421 639	
3. Belanja Modal	783 864 793	565 245 264	
TOTAL BELANJA	3 174 705 762	3 686 889 216	
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		101 509 990	154 990 000
Jumlah	3 276 215 752	3 841 879 216	

Lampiran 3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	15 885 111 874	15 489 989 114
1. Pendapatan Asli Daerah	970 533 448	1 399 372 210
1.1. Pajak Daerah	267 592 214	543 286 094
1.2. Retribusi Daerah	110 946 845	89 320 760
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70 326 504	91 912 685
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	521 667 885	674 852 671
2. Dana Perimbangan	12 749 929 215	11 887 081 689
2.1. Bagi Hasil Pajak	1 458 244 680	1 114 585 360
2.3. Dana Alokasi Umum	8 714 258 772	8 590 433 740
2.4. Dana Alokasi Khusus	2 577 425 763	2 182 062 589
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	2 164 649 211	2 203 535 215
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1 936 961 068	1 891 542 295
Jumlah	17 822 072 942	17 381 531 409

Lampiran 4. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	7 692 774 386	7 748 844 614
1. Belanja Pegawai	5 285 440 116	5 040 026 691
2. Belanja Bunga	5 644 911	20 374 634
3. Belanja Subsidi	9 695 087	22 008 096
4. Belanja Hibah	666 020 195	541 334 105
5. Belanja Bantuan Sosial	26 704 394	41 784 305
6. Belanja Bagi Hasil	20 067 115	45 165 907
7. Belanja Bantuan Keuangan	1 676 740 509	2 030 299 273
8. Belanja Tidak Terduga	2 462 059	7 851 603
B. BELANJA LANGSUNG	8 173 940 196	7 805 030 600
1. Belanja Pegawai	583 941 609	748 708 109
2. Belanja Barang dan Jasa	3 101 913 245	3 033 136 766
3. Belanja Modal	4 488 085 342	4 023 185 725
TOTAL BELANJA	15 866 714 582	15 553 875 214
C. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	169 246 103	140 761 708
Jumlah	16 035 960 685	15 694 636 922

Lampiran 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 322 594 838	1 317 262 615
1. Pendapatan Asli Daerah	143 330 742	176 855 125
1.1. Pajak Daerah	33 359 659	48 280 750
1.2. Retribusi Daerah	14 203 972	12 424 400
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 050 926	8 110 575
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	88 716 185	108 039 400
2. Dana Perimbangan	999 504 184	938 379 875
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	75 757 165	56 433 629
2.2. Dana Alokasi Umum	662 249 343	652 906 913
2.3. Dana Alokasi Khusus	261 497 676	229 039 333
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	179 759 912	202 027 615
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	99 156 972	99 733 037
Jumlah	1 421 751 810	1 416 995 652

Lampiran 6. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	649 484 547	571 736 983
1. Belanja Pegawai	466 082 653	402 416 579
2. Belanja Bunga	858 680	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	54 837 902	22 678 515
5. Belanja Bantuan Sosial	354 550	1 517 250
6. Belanja Bagi Hasil	1 980 543	6 859 967
7. Belanja Bantuan Keuangan	125 252 605	138 256 387
8. Belanja Tidak Terduga	117 614	8 285
B. BELANJA LANGSUNG	631 464 228	719 644 221
1. Belanja Pegawai	50 370 524	56 157 757
2. Belanja Barang dan Jasa	198 455 358	260 165 348
3. Belanja Modal	382 638 346	403 321 116
TOTAL BELANJA	1 280 948 775	1 291 381 204
C. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	40 498 000	9 992 000
Jumlah	1 321 446 775	1 301 373 204

Lampiran 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 683 342 256	1 579 048 584
1. Pendapatan Asli Daerah	189 388 000	245 980 100
1.1. Pajak Daerah	53 246 842	73 380 787
1.2. Retribusi Daerah	13 559 723	10 337 830
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 772 224	7 220 338
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	116 809 211	155 041 145
2. Dana Perimbangan	1 203 679 292	1 101 878 063
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	155 603 037	83 458 818
2.2. Dana Alokasi Umum	832 526 925	820 559 562
2.3. Dana Alokasi Khusus	215 549 330	197 859 683
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	290 274 964	231 190 421
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	183 178 562	319 813 116
Jumlah	1 866 520 818	1 898 861 700

Lampiran 8. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	791 847 148	794 010 574
1. Belanja Pegawai	517 182 196	518 810 699
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	46 358 977	39 678 832
5. Belanja Bantuan Sosial	1 675 554	1 334 019
6. Belanja Bagi Hasil	5 376 063	5 564 687
7. Belanja Bantuan Keuangan	221 049 008	227 713 952
8. Belanja Tidak Terduga	205 350	908 385
B. BELANJA LANGSUNG	748 180 774	718 900 885
1. Belanja Pegawai	21 626 380	22 099 732
2. Belanja Barang dan Jasa	432 918 924	440 715 557
3. Belanja Modal	293 635 470	256 085 596
TOTAL BELANJA	1 540 027 922	1 512 911 459
C. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5 370 000	11 370 000
Jumlah	1 545 397 922	1 524 281 459

Lampiran 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 715 688 786	1 724 704 302
1. Pendapatan Asli Daerah	85 832 949	93 717 860
1.1. Pajak Daerah	13 800 062	19 248 376
1.2. Retribusi Daerah	5 974 087	5 823 322
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 935 747	5 525 774
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	62 123 053	63 120 388
2. Dana Perimbangan	1 386 674 190	1 339 890 875
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	166 322 960	198 946 709
2.2. Dana Alokasi Umum	881 812 337	866 321 730
2.3. Dana Alokasi Khusus	338 538 893	274 622 436
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	243 181 647	291 095 567
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	248 730 564	204 455 738
Jumlah	1 964 419 350	1 929 160 040

Lampiran 10. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	922 371 561	906 860 658
1. Belanja Pegawai	653 880 817	600 166 117
2. Belanja Bunga	3 275 547	3 258 764
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	26 629 407	17 556 579
5. Belanja Bantuan Sosial	2 345 906	7 521 778
6. Belanja Bagi Hasil	2 443 252	2 084 080
7. Belanja Bantuan Keuangan	232 669 640	271 231 650
8. Belanja Tidak Terduga	1 126 992	5 041 690
B. BELANJA LANGSUNG	826 473 274	862 590 506
1. Belanja Pegawai	53 552 427	70 604 591
2. Belanja Barang dan Jasa	252 879 977	324 881 937
3. Belanja Modal	520 040 870	467 103 978
TOTAL BELANJA	1 748 844 835	1 769 451 164
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11 269 200	11 702 800
Jumlah	1 760 114 035	1 781 153 964

Lampiran 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	932 032 770	931 583 634
1. Pendapatan Asli Daerah	44 019 870	49 297 480
1.1. Pajak Daerah	6 452 131	7 115 682
1.2. Retribusi Daerah	3 553 262	4 577 254
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 440 119	7 091 751
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	28 574 358	30 512 793
2. Dana Perimbangan	785 114 703	769 484 748
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46 971 284	43 989 141
2.2. Dana Alokasi Umum	583 667 676	576 041 341
2.3. Dana Alokasi Khusus	154 475 743	149 454 266
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	102 898 197	112 801 406
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	98 427 571	84 550 669
Jumlah	1 030 460 341	1 016 134 303

Lampiran 12. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	514 478 019	511 770 872
1. Belanja Pegawai	359 973 666	342 891 625
2. Belanja Bunga	7 588	0
3. Belanja Subsidi	0	1 000 000
4. Belanja Hibah	45 086 359	26 505 257
5. Belanja Bantuan Sosial	4 450 296	7 360 123
6. Belanja Bagi Hasil	781 000	529 246
7. Belanja Bantuan Keuangan	104 179 110	133 219 716
8. Belanja Tidak Terduga	0	264 905
B. BELANJA LANGSUNG	425 120 438	400 874 909
1. Belanja Pegawai	666 906	48 684 419
2. Belanja Barang dan Jasa	260 971 124	218 573 706
3. Belanja Modal	163 482 408	133 616 784
TOTAL BELANJA	939 598 457	912 645 781
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5 873 784	5 578 000
Jumlah	945 472 241	918 223 781

Lampiran 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 219 855 290	1 075 758 067
1. Pendapatan Asli Daerah	56 816 976	64 810 020
1.1. Pajak Daerah	9 595 705	8 550 869
1.2. Retribusi Daerah	4 339 172	4 208 653
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 689 135	7 906 774
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	37 192 964	44 143 724
2. Dana Perimbangan	980 110 721	804 344 613
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	231 924 158	147 228 406
2.2. Dana Alokasi Umum	569 672 938	559 665 616
2.3. Dana Alokasi Khusus	178 513 625	97 450 591
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	182 927 593	206 603 434
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	205 274 418	382 344 400
Jumlah	1 425 129 708	1 458 102 467

Lampiran 14. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	557 651 814	537 972 659
1. Belanja Pegawai	403 908 154	364 037 909
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	32 769 763	43 422 539
5. Belanja Bantuan Sosial	360 628	1 487 840
6. Belanja Bagi Hasil	1 363 520	1 314 825
7. Belanja Bantuan Keuangan	119 162 099	127 345 546
8. Belanja Tidak Terduga	87 650	364 000
B. BELANJA LANGSUNG	564 784 069	614 884 551
1. Belanja Pegawai	36 958 427	37 172 780
2. Belanja Barang dan Jasa	217 287 183	197 898 771
3. Belanja Modal	310 538 459	379 813 000
TOTAL BELANJA	1 122 435 883	1 152 857 210
C. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18 246 400	12 242 800
Jumlah	1 140 682 283	1 165 100 010

Lampiran 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	744 507 431	673 516 440
1. Pendapatan Asli Daerah	38 622 540	49 848 716
1.1. Pajak Daerah	5 003 197	16 690 027
1.2. Retribusi Daerah	11 229 576	11 001 619
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 685 826	8 261 704
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	15 703 941	13 895 366
2. Dana Perimbangan	667 202 394	569 190 667
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46 011 286	34 234 494
2.2. Dana Alokasi Umum	428 055 095	420 535 543
2.3. Dana Alokasi Khusus	193 136 013	114 420 630
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	38 682 497	54 477 057
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	51 334 327	40 760 819
Jumlah	795 841 758	714 277 259

Lampiran 16. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	240 144 843	249 528 304
1. Belanja Pegawai	141 597 943	158 335 304
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	30 302 531	15 472 809
5. Belanja Bantuan Sosial	552 015	285 000
6. Belanja Bagi Hasil	1 600 000	1 650 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	66 092 354	73 785 191
8. Belanja Tidak Terduga	0	0
B. BELANJA LANGSUNG	499 013 150	422 489 195
1. Belanja Pegawai	41 370 591	46 120 538
2. Belanja Barang dan Jasa	114 209 830	123 211 258
3. Belanja Modal	343 432 729	253 157 399
TOTAL BELANJA	739 157 993	672 017 499
C. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15 850 903	15 247 853
Jumlah	755 008 896	687 265 352

Lampiran 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	943 106 233	864 429 127
1. Pendapatan Asli Daerah	45 563 688	162 481 918
1.1. Pajak Daerah	15 900 716	118 770 579
1.2. Retribusi Daerah	7 507 122	2 338 248
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 917 574	6 505 429
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	17 238 276	34 867 662
2. Dana Perimbangan	762 929 163	602 806 290
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	66 166 384	44 812 664
2.2. Dana Alokasi Umum	466 229 206	462 248 605
2.3. Dana Alokasi Khusus	230 533 573	95 745 021
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	134 613 382	99 140 919
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	125 983 908	151 713 092
Jumlah	1 069 090 141	1 016 142 219

Lampiran 18. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	348 353 450	426 313 759
1. Belanja Pegawai	241 982 576	248 815 126
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	14 439 498	41 367 365
5. Belanja Bantuan Sosial	1 696 633	1 238 631
6. Belanja Bagi Hasil	1 074 967	11 690 891
7. Belanja Bantuan Keuangan	89 159 776	123 201 746
8. Belanja Tidak Terduga	0	0
B. BELANJA LANGSUNG	566 793 598	469 452 916
1. Belanja Pegawai	49 057 010	58 346 940
2. Belanja Barang dan Jasa	184 607 007	177 572 197
3. Belanja Modal	333 129 581	233 533 779
TOTAL BELANJA	915 147 048	895 766 675
C. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12 230 000	20 646 832
Jumlah	927 377 048	916 413 507

Lampiran 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 042 119 075	1 100 045 651
1. Pendapatan Asli Daerah	56 880 204	110 713 320
1.1. Pajak Daerah	7 470 165	60 038 441
1.2. Retribusi Daerah	8 807 509	10 212 959
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 435 728	6 535 824
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	35 166 802	33 926 096
2. Dana Perimbangan	865 979 159	863 833 764
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	147 138 526	109 962 950
2.2. Dana Alokasi Umum	621 428 614	616 493 956
2.3. Dana Alokasi Khusus	97 412 019	137 376 858
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	119 259 712	125 498 567
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	225 225 173	238 717 510
Jumlah	1 267 344 248	1 338 763 161

Lampiran 20. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	427 856 232	470 148 605
1. Belanja Pegawai	241 785 853	247 371 740
2. Belanja Bunga	0	15 636 330
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	42 904 728	55 695 847
5. Belanja Bantuan Sosial	313 192	226 331
6. Belanja Bagi Hasil	1 301 425	5 794 821
7. Belanja Bantuan Keuangan	141 551 034	145 423 536
8. Belanja Tidak Terduga	0	0
B. BELANJA LANGSUNG	594 261 416	577 495 382
1. Belanja Pegawai	58 360 745	71 793 361
2. Belanja Barang dan Jasa	178 170 193	184 440 927
3. Belanja Modal	357 730 478	321 261 094
TOTAL BELANJA	1 022 117 648	1 047 643 987
C. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6 500 000	7 500 000
Jumlah	1 028 617 648	1 055 143 987

Lampiran 21. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 124 910 927	1 162 607 295
1. Pendapatan Asli Daerah	46 280 722	52 990 318
1.1. Pajak Daerah	11 754 994	24 244 009
1.2. Retribusi Daerah	3 228 625	2 981 559
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 143 124	5 749 484
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	27 153 979	20 015 266
2. Dana Perimbangan	918 845 150	920 151 107
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	90 677 885	65 591 541
2.2. Dana Alokasi Umum	708 751 031	696 300 554
2.3. Dana Alokasi Khusus	119 416 234	158 259 012
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	159 785 055	189 465 870
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	154 601 396	114 888 434
Jumlah	1 279 512 323	1 277 495 729

Lampiran 22. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	549 252 245	574 257 220
1. Belanja Pegawai	362 910 191	336 760 300
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	1 449 919	1 194 609
4. Belanja Hibah	59 400 950	26 453 800
5. Belanja Bantuan Sosial	2 474 732	6 334 936
6. Belanja Bagi Hasil	1 154 195	1 486 918
7. Belanja Bantuan Keuangan	121 862 258	201 733 261
8. Belanja Tidak Terduga	0	293 396
B. BELANJA LANGSUNG	605 306 568	605 569 057
1. Belanja Pegawai	36 538 216	45 845 079
2. Belanja Barang dan Jasa	259 328 393	196 768 218
3. Belanja Modal	309 439 959	362 955 760
TOTAL BELANJA	1 154 558 813	1 179 826 277
C. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10 000 000	9 000 000
Jumlah	1 164 558 813	1 188 826 277

Lampiran 23. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	995 212 870	954 037 768
1. Pendapatan Asli Daerah	38 078 420	36 201 584
1.1. Pajak Daerah	9 579 310	9 443 029
1.2. Retribusi Daerah	14 514 773	5 181 753
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 505 515	4 382 689
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	11 478 822	17 194 113
2. Dana Perimbangan	844 581 498	747 346 666
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38 080 638	31 437 739
2.2. Dana Alokasi Umum	576 640 254	568 390 382
2.3. Dana Alokasi Khusus	229 860 606	147 518 545
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	112 552 952	170 489 518
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	60 565 547	34 154 777
Jumlah	1 055 778 417	988 192 545

Lampiran 24. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016		2017	
	(1)	(2)	(3)	
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG		481 536 833		488 904 815
1. Belanja Pegawai		328 668 659		307 059 019
2. Belanja Bunga		0		0
3. Belanja Subsidi		0		0
4. Belanja Hibah		62 358 630		65 981 732
5. Belanja Bantuan Sosial		1 896 000		0
6. Belanja Bagi Hasil		0		638 900
7. Belanja Bantuan Keuangan		88 333 573		114 597 164
8. Belanja Tidak Terduga		279 971		628 000
B. BELANJA LANGSUNG		529 086 792		485 582 872
1. Belanja Pegawai		20 126 648		19 497 905
2. Belanja Barang dan Jasa		160 379 407		155 898 210
3. Belanja Modal		348 580 737		310 186 757
TOTAL BELANJA		1 010 623 625		974 487 687
C. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		11 000 000		4 000 000
Jumlah		1 021 623 625		978 487 687

Lampiran 25. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017	
	(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	980 695 988	1 036 075 767	
1. Pendapatan Asli Daerah	37 472 944	36 509 690	
1.1. Pajak Daerah	7 992 486	10 195 847	
1.2. Retribusi Daerah	2 808 393	2 236 300	
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 337 698	6 425 582	
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	21 334 367	17 651 961	
2. Dana Perimbangan	824 244 038	863 775 454	
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	87 533 553	64 466 676	
2.2. Dana Alokasi Umum	564 028 300	559 898 689	
2.3. Dana Alokasi Khusus	172 682 185	239 410 089	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	118 979 006	135 790 623	
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	77 303 954	47 003 331	
Jumlah	1 057 999 942	1 083 079 098	

Lampiran 26. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	506 684 780	535 652 248
1. Belanja Pegawai	338 040 743	335 493 537
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	30 073 955	45 861 419
5. Belanja Bantuan Sosial	671 962	595 766
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	137 841 620	153 473 190
8. Belanja Tidak Terduga	56 500	228 336
B. BELANJA LANGSUNG	496 790 265	532 707 167
1. Belanja Pegawai	41 980 935	42 332 947
2. Belanja Barang dan Jasa	161 967 118	176 506 556
3. Belanja Modal	292 842 212	313 867 664
TOTAL BELANJA	1 003 475 045	1 068 359 415
C. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7 550 000	6 050 000
Jumlah	1 011 025 045	1 074 409 415

Lampiran 27. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	857 330 973	815 348 404
1. Pendapatan Asli Daerah	34 431 777	100 370 174
1.1. Pajak Daerah	7 048 180	51 907 816
1.2. Retribusi Daerah	2 722 709	2 448 459
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 470 006	8 638 910
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	18 190 882	37 374 989
2. Dana Perimbangan	690 787 004	609 128 868
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	65 154 515	53 023 606
2.2. Dana Alokasi Umum	482 815 506	477 145 707
2.3. Dana Alokasi Khusus	142 816 983	78 959 555
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	132 112 192	105 849 362
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	94 504 395	46 026 729
Jumlah	951 835 368	861 375 133

Lampiran 28. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	482 858 322	531 974 488
1. Belanja Pegawai	317 968 105	347 047 370
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	450 000	450 000
4. Belanja Hibah	41 302 217	38 016 687
5. Belanja Bantuan Sosial	268 660	383 523
6. Belanja Bagi Hasil	2 234 650	6 755 522
7. Belanja Bantuan Keuangan	120 634 690	139 321 386
8. Belanja Tidak Terduga	0	0
B. BELANJA LANGSUNG	415 369 956	320 824 331
1. Belanja Pegawai	6 471 461	64 988 138
2. Belanja Barang dan Jasa	250 503 503	128 277 987
3. Belanja Modal	158 394 992	127 558 206
TOTAL BELANJA	898 228 278	852 798 819
C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7 400 000	0
Jumlah	905 628 278	852 798 819

Lampiran 29. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya (Ribu Rupiah), 2016-2017

Jenis Pendapatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1 195 030 568	1 161 799 194
1. Pendapatan Asli Daerah	33 853 527	68 670 822
1.1. Pajak Daerah	7 226 675	7 453 988
1.2. Retribusi Daerah	3 011 165	2 810 488
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 796 757	6 127 671
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	18 818 930	52 278 675
2. Dana Perimbangan	1 033 953 475	959 263 098
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	194 704 286	137 497 339
2.2. Dana Alokasi Umum	678 555 108	667 654 598
2.3. Dana Alokasi Khusus	160 694 081	154 111 161
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	127 223 566	133 865 274
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	209 003 599	93 153 878
Jumlah	1 404 034 167	1 254 953 072

**Lampiran 30. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya
(Ribu Rupiah), 2016-2017**

Jenis Belanja	2016	2017	
	(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	606 531 187	622 495 134	
1. Belanja Pegawai	366 171 534	346 272 142	
2. Belanja Bunga	0	0	
3. Belanja Subsidi	7 795 168	19 363 487	
4. Belanja Hibah	120 328 652	69 258 894	
5. Belanja Bantuan Sosial	4 248 360	6 780 832	
6. Belanja Bagi Hasil	757 500	796 050	
7. Belanja Bantuan Keuangan	106 641 991	179 948 729	
8. Belanja Tidak Terduga	587 982	75 000	
B. BELANJA LANGSUNG	699 099 102	499 966 451	
1. Belanja Pegawai	87 703 781	86 036 009	
2. Belanja Barang dan Jasa	222 882 439	194 091 108	
3. Belanja Modal	388 512 882	219 839 334	
TOTAL BELANJA	1 305 630 289	1 122 461 585	
C. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5 250 000	6 250 000	
Jumlah	1 310 880 289	1 128 711 585	

**Lampiran 31. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
(Ribu Rupiah), 2016-2017**

Jenis Pendapatan	2016	2017	
	(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH		1 128 683 869	1 093 772 266
1. Pendapatan Asli Daerah		119 961 089	150 925 083
1.1. Pajak Daerah		79 162 092	87 965 894
1.2. Retribusi Daerah		15 486 757	12 737 916
1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 146 125	3 430 180
1.4. Lain-lain PAD yang Sah		23 166 115	46 791 093
2. Dana Perimbangan		786 324 244	797 607 601
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		46 199 003	43 501 648
2.2. Dana Alokasi Umum		657 826 439	646 270 544
2.3. Dana Alokasi Khusus		82 298 802	107 835 409
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah		222 398 536	145 239 582
B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		103 670 682	34 226 765
Jumlah		1 232 354 551	1 127 999 031

**Lampiran 32. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
(Ribu Rupiah), 2016-2017**

Jenis Belanja	2016	2017	
	(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	613 723 405	527 218 295	
1. Belanja Pegawai	545 287 026	484 549 224	
2. Belanja Bunga	1 503 096	1 479 540	
3. Belanja Subsidi	0	0	
4. Belanja Hibah	59 226 626	33 383 830	
5. Belanja Bantuan Sosial	5 395 906	6 718 276	
6. Belanja Bagi Hasil	0	0	
7. Belanja Bantuan Keuangan	2 310 751	1 047 819	
8. Belanja Tidak Terduga	0	39 606	
B. BELANJA LANGSUNG	572 196 566	574 048 157	
1. Belanja Pegawai	79 157 558	79 027 913	
2. Belanja Barang dan Jasa	207 352 789	254 134 986	
3. Belanja Modal	285 686 219	240 885 258	
TOTAL BELANJA	1 185 919 971	1 101 266 452	
C. PENGELOUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12 207 816	21 181 423	
Jumlah	1 198 127 787	1 122 447 875	

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Kapten Pierre Tendean No. 06, Palangka Raya, 73112

Telp: (0536) 3228105, Fax: (0536) 3221380

Homepage: <http://kalteng.bps.go.id>, Email: bps6200@bps.go.id

ISBN 978-602-5671-38-8

9 786025 671388